PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2025, sinkronisasi proyek atau program sesuai dengan pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, dan sinkronisasi proyek atau program di bidang energi, pangan, dan air untuk mendukung target swasembada pangan nasional, meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan, serta mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah, perlu dilakukan perubahan daftar Proyek Strategis Nasional sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6654);
4. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 164) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 363);
5. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
6. Peraturan Presiden Nomor 143 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 339);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 113);
9. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1034) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 683);
10. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 15 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 923);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL.

Pasal I

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1034) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian:

a. Nomor 9 Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 688);
b. Nomor 21 Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1260);
c. Nomor 7 Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 675);
d. Nomor 8 Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 904);
e. Nomor 6 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 257);
f. Nomor 12 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 683);
g. Nomor 2 Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 154),

diubah sebagai berikut:

1. Setelah ayat (2) Pasal 2A ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

(1) Setiap penanggung jawab Proyek Strategis Nasional harus menyelesaikan Proyek Strategis Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Koordinator ini secara tepat waktu sesuai dengan dokumen perencanaan yang disampaikan pada saat pengusulan Proyek Strategis Nasional.
(2) Dalam hal Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan tepat waktu, penanggung jawab Proyek Strategis Nasional melaporkan pelaksanaan dan usulan revisi rencana penyelesaian kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
(3) Laporan pelaksanaan dan usulan revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sesuai dengan kewenangannya.

2. Di antara Pasal 2A dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 2B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2B

Dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A, sinkronisasi dan pengendalian Proyek Strategis Nasional dikoordinasikan bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Pangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sesuai dengan kewenangannya.

3. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

Pasal II

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 September 2025

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 September 2025

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 717

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL

# PERUBAHAN DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL

I. PROYEK

| NO. | DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL | LOKASI |
|---|---|---|
| A. Sektor Jalan dan Jembatan | | |
| 1. | Jalan Tol Serang - Panimbang | Provinsi Banten |
| 2. | Jalan Tol Pandaan - Malang | Provinsi Jawa Timur |
| 3. | Jalan Tol Manado - Bitung | Provinsi Sulawesi Utara |
| 4. | Jalan Tol Balikpapan - Samarinda | Provinsi Kalimantan Timur |
| 5. | Jalan Tol Medan - Binjai - bagian dari Trans Sumatera | Provinsi Sumatera Utara |
| 6. | Jalan Tol Pekanbaru - Kandis - Dumai - bagian dari Trans Sumatera | Provinsi Riau |
| 7. | Jalan Tol Kisaran - Tebing Tinggi - bagian dari Trans Sumatera | Provinsi Sumatera Utara |
| 8. | Jalan Tol Sigli - Banda Aceh - bagian dari Trans Sumatera | Provinsi Aceh |
| 9. | Jalan Tol Binjai - Langsa - bagian dari Trans Sumatera | Provinsi Aceh dan Sumatera Utara |
| 10. | Jalan Tol Bukittinggi - Padang Panjang - Lubuk Alung - Padang - bagian dari Trans Sumatera | Provinsi Sumatera Barat |
| 11. | Jalan Tol Pekanbaru - Bangkinang - Payakumbuh - Bukittinggi - bagian dari Trans Sumatera | Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau |
| 12. | Jalan Tol Tebing Tinggi - Pematang Siantar - Prapat - Tarutung - Sibolga - bagian dari Trans Sumatera | Provinsi Sumatera Utara |
| 13. | Jalan Tol Betung (Sp. Sekayu) - Tempino - Jambi - bagian dari Trans Sumatera | Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan |
| 14. | Jalan Tol Jambi - Rengat - bagian dari Trans Sumatera | Provinsi Jambi dan Riau |

| NO. | DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL | LOKASI |
|---|---|---|
| 15. | Jalan Tol Rengat - Pekanbaru - bagian dari Trans Sumatera | Provinsi Riau |
| 16. | Jalan Tol Simpang Indralaya - Muara Enim - bagian dari Trans Sumatera | Provinsi Sumatera Selatan |
| 17. | Jalan Tol Lubuk Linggau - Curup - Bengkulu - bagian dari Trans Sumatera | Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu |
| 18. | Jalan Tol Kayu Agung - Palembang - Betung | Provinsi Sumatera Selatan |
| 19. | Jalan Tol Cileunyi - Sumedang - Dawuan | Provinsi Jawa Barat |
| 20. | Jalan Tol Ciawi - Sukabumi - Ciranjang - Padalarang | Provinsi Jawa Barat |
| 21. | Jalan Tol Cengkareng - Batu Ceper - Kunciran | Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Banten |
| 22. | Jalan Tol Serpong - Cinere | Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat |
| 23. | Jalan Tol Cinere - Jagorawi | Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Jawa Barat |
| 24. | Jalan Tol Cimanggis - Cibitung | Provinsi Jawa Barat |
| 25. | Jalan Tol Cibitung - Cilincing | Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Jawa Barat |
| 26. | Jalan Tol Bekasi - Cawang - Kampung Melayu | Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Jawa Barat |
| 27. | Jalan Tol Serpong - Balaraja | Provinsi Banten |
| 28. | Jalan Tol Semanan - Sunter - bagian dari 6 ruas tol Daerah Khusus Ibukota Jakarta | Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta |
| 29. | Jalan Tol Sunter - Pulo Gebang - bagian dari 6 ruas tol Daerah Khusus Ibukota Jakarta | Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta |
| 30. | Jalan Tol Duri Pulo - Kampung Melayu - bagian dari 6 ruas tol Daerah Khusus Ibukota Jakarta | Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta |
| 31. | Jalan Tol Kemayoran - Kampung Melayu - bagian dari 6 ruas tol Daerah Khusus Ibukota Jakarta | Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta |
| 32. | Jalan Tol Ulujami - Tanah Abang - bagian dari 6 ruas tol Daerah Khusus Ibukota Jakarta | Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta |
| 33. | Jalan Tol Pasar Minggu - Casablanca - bagian dari 6 ruas tol Daerah Khusus Ibukota Jakarta | Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta |
| 34. | Jalan Tol Pasuruan - Probolinggo | Provinsi Jawa Timur |
| 35. | Jalan Tol Probolinggo - Banyuwangi | Provinsi Jawa Timur |
| 36. | Jalan Tol Krian - Legundi - Bunder - Manyar | Provinsi Jawa Timur |

| NO. | DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL | LOKASI |
|---|---|---|
| 37. | Jalan Tol Jakarta - Cikampek II Sisi Selatan | Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Jawa Barat |
| 38. | Jalan Tol Semarang - Demak | Provinsi Jawa Tengah |
| 39. | Jalan Tol Yogyakarta - Bawen | Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah |
| 40. | Pembangunan *Fly Over* dari dan Menuju Terminal Teluk Lamong | Provinsi Jawa Timur |
| 41. | Jalan Tol Ngawi - Kertosono - Kediri | Provinsi Jawa Timur |
| 42. | Jalan Tol Depok - Antasari (termasuk Bojonggede - Salabenda) | Provinsi Jawa Barat |
| 43. | Jalan Tol Solo - Yogyakarta - Kulon Progo | Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta |
| 44. | Jalan Tol Bogor *Ring Road* (termasuk Caringin - Salabenda) | Provinsi Jawa Barat |
| 45. | Jalan Tol Gedebage - Tasikmalaya - Cilacap | Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah |
| 46. | Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban | Provinsi Jawa Barat |
| 47. | Pembangunan Jalan Tol Gilimanuk - Negara - Pekutatan - Soka – Mengwi | Provinsi Bali |
| 48. | Pembangunan Akses Pelabuhan Tanjung Priok Timur Baru/*New Priok Eastern Access* (NPEA) | Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta |
| 49. | Pengembangan Jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono, M.Sc. *Section Harbour Road* II (Pembangunan Jalan Tol Ancol Timur - Pluit (*Elevated*)) | Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta |
| 50. | Pengembangan Jalan Tol Dalam Kota Bandung:<br>a. *North - South Link* Bandung; dan<br>b. Bandung *Inter Urban Toll Road* | Provinsi Jawa Barat |
| B. Sektor Pelabuhan | | |
| 51. | Pelabuhan KEK Maloy | Provinsi Kalimantan Timur |
| 52. | Pelabuhan Sanur - Nusa Ceningan/Lembongan | Provinsi Bali |
| 53. | Pelabuhan Likupang | Provinsi Sulawesi Utara |
| 54. | Makassar *New Port* | Provinsi Sulawesi Selatan |
| 55. | Terminal *Multipurpose* Labuan Bajo | Provinsi Nusa Tenggara Timur |
| 56. | Pembangunan Pelabuhan Patimban | Provinsi Jawa Barat |
| 57. | Pengembangan Pelabuhan Terminal Kijing | Provinsi Kalimantan Barat |

| NO. | DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL | LOKASI |
|---|---|---|
| 58. | Pengembangan Pelabuhan Kupang | Provinsi Nusa Tenggara Timur |
| 59. | Pengembangan Pelabuhan Sorong | Provinsi Papua Barat Daya |
| 60. | Pengembangan Pelabuhan Teluk Palu | Provinsi Sulawesi Tengah |
| 61. | Pengembangan Pelabuhan *Hub* Internasional Kuala Tanjung | Provinsi Sumatera Utara |
| 62. | Pengembangan Pelabuhan *Hub* Internasional Bitung | Provinsi Sulawesi Utara |
| 63. | Pengembangan Pelabuhan Benoa (Bali *Maritime Tourism Hub*) | Provinsi Bali |
| 64. | Pembangunan Pelabuhan Palembang Baru/*New* Palembang | Provinsi Sumatera Selatan |
| 65. | Pembangunan Pelabuhan Terminal Peti Kemas Muaro Jambi | Provinsi Jambi |
| C. Sektor Bandar Udara | | |
| 66. | Bandar Udara Baru Yogyakarta - Kulon Progo | Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta |
| 67. | Bandar Udara Kediri | Provinsi Jawa Timur |
| 68. | Bandar Udara Komodo - Labuan Bajo | Provinsi Nusa Tenggara Timur |
| 69. | Pengembangan Bandar Udara Internasional Lombok Praya | Provinsi Nusa Tenggara Barat |
| 70. | Pembangunan Bandar Udara Nabire Baru | Provinsi Papua Tengah |
| 71. | Pembangunan Bandar Udara Siboru Fak Fak | Provinsi Papua Barat |
| 72. | Pengembangan Bandar Udara Raja Haji Abdullah Tanjung Balai Karimun | Provinsi Kepulauan Riau |
| D. Sektor Kereta | | |
| 73. | Kereta Api Makassar - Parepare (Tahap I dari Pengembangan Jalur Lintas Barat Sulawesi Bagian Selatan) | Provinsi Sulawesi Selatan |
| 74. | Kereta Api Tebing Tinggi - Kuala Tanjung (mendukung KEK Sei Mangkei, bagian dari Jaringan Kereta Api Trans Sumatera) | Provinsi Sumatera Utara |
| 75. | Kereta Api Rantau Prapat - Kota Pinang | Provinsi Sumatera Utara |
| 76. | Kereta Api Akses Bandar Udara Baru Yogyakarta - Kulon Progo | Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta |
| 77. | *Double Track* Jawa Selatan | Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Provinsi Jawa Timur |

| NO. | DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL | LOKASI |
|---|---|---|
| 78. | *High Speed Railway* Jakarta - Bandung | Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Jawa Barat |
| 79. | Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* (LRT) Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi | Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Jawa Barat |
| 80. | Kereta Api Logistik Lahat – Kertapati | Provinsi Sumatera Selatan |
| 81. | Infrastruktur Kereta Api Logistik di Kalimantan Timur | Provinsi Kalimantan Timur |
| 82. | *Light Rail Transit* (LRT) Provinsi Sumatera Selatan (Metro Palembang) | Provinsi Sumatera Selatan |
| 83. | *Light Rail Transit* (LRT) Jakarta Segmen Velodrome – Manggarai | Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta |
| 84. | Jakarta *Mass Rapid Transit* (MRT) *North - South* (Bundaran HI - Kota - Ancol Barat) | Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta |
| 85. | *Mass Rapid Transit* (MRT) Jakarta *East - West Phase* I | Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Banten, dan Provinsi Jawa Barat |
| E. Sektor Kawasan | | |
| 86. | Kawasan Industri Kuala Tanjung | Provinsi Sumatera Utara |
| 87. | Kawasan Industri Landak | Provinsi Kalimantan Barat |
| 88. | Kawasan Industri Ketapang | Provinsi Kalimantan Barat |
| 89. | Kawasan Industri Jorong | Provinsi Kalimantan Selatan |
| 90. | Kawasan Industri Bantaeng | Provinsi Sulawesi Selatan |
| 91. | Kawasan Industri Morowali | Provinsi Sulawesi Tengah |
| 92. | Kawasan Industri Konawe | Provinsi Sulawesi Tenggara |
| 93. | Kawasan Industri Teluk Bintuni dan Pengembangan Industri Metanol, Amonia, dan Pemanfaatan Karbon dari hasil CCUS/CCS di Teluk Bintuni | Provinsi Papua Barat |
| 94. | Kawasan Industri Tanah Kuning | Provinsi Kalimantan Utara |
| 95. | Kawasan Industri Wilmar Serang | Provinsi Banten |
| 96. | Kawasan Industri Pulau Obi | Provinsi Maluku Utara |
| 97. | Kawasan Industri Weda Bay | Provinsi Maluku Utara |

| NO. | DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL | LOKASI |
|---|---|---|
| 98. | Kawasan Industri Takalar | Provinsi Sulawesi Selatan |
| 99. | Kawasan Industri Tanjung Enim | Provinsi Sumatera Selatan |
| 100. | Kawasan Terintegrasi Merak - Bakauheni | Provinsi Banten dan Provinsi Lampung |
| 101. | Kawasan Industri Terpadu Batang | Provinsi Jawa Tengah |
| 102. | Kawasan Industri Indonesia Konawe *Industrial Park* (IKIP) | Provinsi Sulawesi Tenggara |
| 103. | Kawasan Industri Tanjung Sauh | Provinsi Kepulauan Riau |
| 104. | Kawasan Industri Indonesia Pomalaa *Industry Park* | Provinsi Sulawesi Tenggara |
| 105. | Kawasan Industri Motui | Provinsi Sulawesi Tenggara |
| 106. | Kawasan Industri Kendari | Provinsi Sulawesi Tenggara |
| 107. | Kawasan Industri Pulau Ladi | Provinsi Kepulauan Riau |
| 108. | Kawasan Industri Pupuk Fakfak | Provinsi Papua Barat |
| 109. | Kawasan Industri Indonesia Huabao *Industrial Park* | Provinsi Sulawesi Tengah |
| 110. | Kawasan Industri Indonesia Dahuaxing *Industry Park* (IDIP) | Provinsi Sulawesi Tengah |
| 111. | Kawasan Industri Indonesia Huali *Industry Park* (IHIP) | Provinsi Sulawesi Selatan |
| 112. | Dihapus | Dihapus |
| 113. | Kawasan Industri Wiraraja *Green Renewable Energy & Smart-Eco Industrial Park* (GESEIP) | Provinsi Kepulauan Riau |
| 114. | Kawasan Industri *Neo Energy* Parimo *Industrial Estate* (NEPIE) | Provinsi Sulawesi Tengah |
| 115. | Kawasan Industri Patimban *Industrial Estate* | Provinsi Jawa Barat |
| 116. | Kawasan Industri Indonesia Giga *Industry Park* (IGIP) | Provinsi Sulawesi Tenggara |
| 117. | Kawasan Industri Kolaka *Resources Industrial Park* (KRIP) | Provinsi Sulawesi Tenggara |
| 118. | Kawasan Industri ASPIRE *Stargate* (ASPR) | Provinsi Sulawesi Tenggara |
| 119. | Kawasan Industri *Neo Energy* Morowali *Industrial Estate* (NEMIE) | Provinsi Sulawesi Tengah |
| 120. | Pengembangan Kawasan Industri Toapaya, Pulau Poto, dan Kampung Masiran | Provinsi Kepulauan Riau |
| 121. | Kawasan Pesisir Terpadu Surabaya *Waterfront Land* (SWL) | Provinsi Jawa Timur |

| NO. | DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL | LOKASI |
|---|---|---|
| 122. | Kawasan Pengembangan Terpadu Bumi Serpong Damai (Kawasan Khusus Pendidikan, Riset, Ekonomi Digital, dan Pengembangan Teknologi, Industri Kreatif, Kesehatan dan *Biomedical* Terpadu) | Provinsi Banten |
| 123. | Kawasan Industri Tekno Hijau Konasara (KITHK) | Provinsi Sulawesi Tenggara |
| 124. | Kawasan Industri Hijau Futong | Provinsi Riau |
| 125. | Kawasan Industri Pulau Penebang | Provinsi Kalimantan Barat |
| 126. | Kawasan Industri Kumai Multi Energi | Provinsi Kalimantan Tengah |
| 127. | Kawasan Industri Alumina Toba | Provinsi Kalimantan Barat |
| 128. | Kawasan Industri Indo Mineral Mining | Provinsi Sulawesi Tengah |
| 129. | Kawasan Industri Sungai Tabuk | Provinsi Kalimantan Tengah |
| 130. | Kawasan Industri Rimau | Provinsi Kalimantan Tengah |
| F. Sektor Perumahan | | |
| 131. | Pembangunan Rumah Susun | Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta |
| 132. | Pembangunan Bantuan Rumah Swadaya | Nasional |
| G. Sektor Bendungan dan Irigasi | | |
| 133. | Bendungan Marangkayu | Provinsi Kalimantan Timur |
| 134. | Bendungan Kuningan | Provinsi Jawa Barat |
| 135. | Bendungan Bendo | Provinsi Jawa Timur |
| 136. | Bendungan Gongseng | Provinsi Jawa Timur |
| 137. | Bendungan Tukul | Provinsi Jawa Timur |
| 138. | Bendungan Pidekso | Provinsi Jawa Tengah |
| 139. | Bendungan Tugu | Provinsi Jawa Timur |
| 140. | Bendungan Karalloe | Provinsi Sulawesi Selatan |
| 141. | Bendungan Keureuto | Provinsi Aceh |
| 142. | Bendungan Tapin | Provinsi Kalimantan Selatan |
| 143. | Bendungan Passeloreng | Provinsi Sulawesi Selatan |
| 144. | Bendungan Lolak | Provinsi Sulawesi Utara |

| NO. | DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL | LOKASI |
|---|---|---|
| 145. | Bendungan Bintang Bano | Provinsi Nusa Tenggara Barat |
| 146. | Bendungan Karian | Provinsi Banten |
| 147. | Bendungan Rukoh dan Bangunan Pengarah Bendungan Rukoh | Provinsi Aceh |
| 148. | Bendungan Way Sekampung | Provinsi Lampung |
| 149. | Bendungan Kuwil Kawangkoan | Provinsi Sulawesi Utara |
| 150. | Bendungan Ladongi | Provinsi Sulawesi Tenggara |
| 151. | Bendungan Ciawi | Provinsi Jawa Barat |
| 152. | Bendungan Sukamahi | Provinsi Jawa Barat |
| 153. | Bendungan Leuwikeris | Provinsi Jawa Barat |
| 154. | Bendungan Cipanas | Provinsi Jawa Barat |
| 155. | Bendungan Tiga Dihaji | Provinsi Sumatera Selatan |
| 156. | Bendungan Semantok | Provinsi Jawa Timur |
| 157. | Bendungan Pamukkulu | Provinsi Sulawesi Selatan |
| 158. | Bendungan Bener | Provinsi Jawa Tengah |
| 159. | Bendungan Sadawarna | Provinsi Jawa Barat |
| 160. | Bendungan Lausimeme | Provinsi Sumatera Utara |
| 161. | Bendungan Sidan | Provinsi Bali |
| 162. | Bendungan Marga Tiga | Provinsi Lampung |
| 163. | Bendungan Bagong | Provinsi Jawa Timur |
| 164. | Bendungan Randugunting | Provinsi Jawa Tengah |
| 165. | Bendungan Mbay | Provinsi Nusa Tenggara Timur |
| 166. | Bendungan Bulango Ulu | Provinsi Gorontalo |
| 167. | Bendungan Napun Gete | Provinsi Nusa Tenggara Timur |
| 168. | Bendungan Temef | Provinsi Nusa Tenggara Timur |
| 169. | Bendungan Way Apu | Provinsi Maluku |
| 170. | Bendungan Meninting | Provinsi Nusa Tenggara Barat |
| 171. | Bendungan Tamblang | Provinsi Bali |
| 172. | Bendungan Beringin Sila | Provinsi Nusa Tenggara Barat |
| 173. | Bendungan Tiu Suntuk | Provinsi Nusa Tenggara Barat |

| NO. | DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL | LOKASI |
|---|---|---|
| 174. | Bendungan Manikin | Provinsi Nusa Tenggara Timur |
| 175. | Bendungan Jlantah | Provinsi Jawa Tengah |
| 176. | Bendungan Jragung | Provinsi Jawa Tengah |
| 177. | Bendungan Sepaku Semoi | Provinsi Kalimantan Timur |
| 178. | Bendungan Budong-Budong | Provinsi Sulawesi Barat |
| 179. | Bendungan Ameroro | Provinsi Sulawesi Tenggara |
| 180. | Bendungan Karangnongko | Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Timur |
| 181. | Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Lhok Guci | Provinsi Aceh |
| 182. | Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Jambo Aye Kanan | Provinsi Aceh |
| 183. | Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Lematang | Provinsi Sumatera Selatan |
| 184. | Pembangunan Bendung dan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Baliase | Provinsi Sulawesi Selatan |
| 185. | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Gumbasa | Provinsi Sulawesi Tengah |
| 186. | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Rentang | Provinsi Jawa Barat |
| 187. | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Glapan | Provinsi Jawa Tengah |
| 188. | Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Komering | Provinsi Sumatera Selatan |
| 189. | Pembangunan dan Pengelolaan *Estuary Dam* di Teluk Bintan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | Provinsi Kepulauan Riau |
| H. Sektor Air Bersih dan Sanitasi | | |
| 190. | Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Semarang Barat | Provinsi Jawa Tengah |
| 191. | Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan | Provinsi Jawa Timur |
| 192. | Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kota Bandar Lampung | Provinsi Lampung |
| 193. | Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Jatiluhur | Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta |
| 194. | Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Wosusokas | Provinsi Jawa Tengah |
| 195. | Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Karian - Serpong | Provinsi Banten dan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta |

| NO. | DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL | LOKASI |
|---|---|---|
| 196. | Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Benteng - Kobema (Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, dan Seluma) | Provinsi Bengkulu |
| 197. | Sarana dan Prasarana Air Baku Karian | Provinsi Banten |
| 198. | Jakarta *Sewerage System* (JSS) | Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta |
| I. Sektor Tanggul Pantai | | |
| 199. | Tanggul Pantai | Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten |
| J. Sektor Energi | | |
| 200. | Pengembangan Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela | Provinsi Maluku |
| 201. | Pengembangan Lapangan Gendalo, Gandang, Gehem, dan Bangka (Indonesia *Deepwater Development Project*/IDD) | Provinsi Kalimantan Timur |
| 202. | Proyek Tangguh LNG *Train* 3 | Provinsi Papua Barat |
| 203. | Pengembangan Lapangan Unitisasi Gas Jambaran - Tiung Biru | Provinsi Jawa Timur |
| 204. | Pengembangan Lapangan Ubadari, CCUS, dan *Compresion* (*UCC Project*) di Teluk Bintuni | Provinsi Papua Barat |
| 205. | Pengembangan Lapangan Gas Asap, Kido, dan Merah (AKM) | Provinsi Papua Barat |
| 206. | Kilang Minyak Tuban (Ekspansi) | Provinsi Jawa Timur |
| 207. | *Upgrading* Kilang-Kilang Eksisting/*Refinery Development Master Plan* (RDMP) | Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Riau, dan Provinsi Sumatera Selatan |
| 208. | *Upgrading* Kilang Eksisting (RDMP) dan Industri Petrokimia Balongan | Provinsi Jawa Barat |
| 209. | Konstruksi Tangki Penyimpanan BBM | Indonesia Bagian Timur |
| 210. | Konstruksi Tangki Penyimpanan LPG | Indonesia Bagian Timur |
| 211. | Pembangunan Jaringan Gas Kota | Nasional |
| 212. | Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Cirebon - Semarang (Tahap I Ruas Semarang - Batang dan Tahap II Ruas Batang - Indramayu) serta Ruas Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei - Dumai | Provinsi Jawa Barat - Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Sumatera Utara - Provinsi Riau |
| 213. | Pembangunan Bahan Bakar Hijau (*Green Refinery* RU IV Cilacap, Hidrogenasi CPO RU IV Cilacap, *Green Refinery* RU III Plaju, Katalis Merah Putih Pupuk Kujang Cikampek) | Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Sumatera Selatan, dan Provinsi Jawa Barat |

| NO. | DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL | LOKASI |
|---|---|---|
| 214. | Pengembangan *Biofuel* dari Metanol dan Etanol di Kabupaten Bojonegoro | Provinsi Jawa Timur |
| 215. | Gasifikasi Batubara di Tanjung Enim | Provinsi Sumatera Selatan |
| 216. | Gasifikasi Batubara di Kutai Timur | Provinsi Kalimantan Timur |
| 217. | *North Hub Development Project* Selat Makassar | Provinsi Kalimantan Timur |
| K. Sektor Teknologi | | |
| 218. | Percepatan Pembangunan *Technopark* | Nasional |
| 219. | Proyek Satelit Multifungsi | Nasional |
| 220. | Pengembangan *Drone Male* Kombatan (*Male Unmaned Combat Aerial Vehicle*) | Nasional |
| 221. | Pengembangan Teknologi Produksi IVO dan Bensin Sawit dengan Katalis Merah Putih yang Terintegrasi dengan Kebun Rakyat | Nasional |
| 222. | Pengembangan Industri Garam | Nasional |
| 223. | Palapa Ring Integrasi | Nasional |
| L. Sektor Pendidikan | | |
| 224. | Pembangunan Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia | Provinsi Jawa Barat |
| M. Sektor Pariwisata | | |
| 225. | Proyek Pariwisata Seribu Pulau di Kepulauan Seribu | Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta |
| 226. | Dihapus | Dihapus |
| N. Sektor Pertanian dan Perkebunan | | |
| 227. | Pembangunan Kelapa Dalam dan Industri Turunannya | Provinsi Papua Barat Daya |
| 228. | Pengembangan Lahan Sawah Rawa Pasang Surut Tanah Mineral dan Rawa Lebak Tanah Mineral | Provinsi Sumatera Selatan |

II. PROGRAM

| NO. | DAFTAR PROGRAM STRATEGIS NASIONAL | KETERANGAN PROGRAM STRATEGIS NASIONAL |
|---|---|---|
| 1. | Program Ketenagalistrikan | Program Ketenagalistrikan terdiri dari:<br>a. Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (PIK) (daftar proyek diatur dalam Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan);<br>b. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap Nasional;<br>c. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Skala Besar di Kepulauan Riau; dan<br>d. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air Sungai Mentarang di Kalimantan Utara. |
| 2. | Program Pemerataan Ekonomi | Percepatan Penyelesaian Pengukuhan Kawasan Hutan, Perhutanan Sosial, Reforma Agraria, Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, Peremajaan Kebun Rakyat, dan Lahan Pertanian bagi Masyarakat Korban Konflik di Provinsi Aceh. |
| 3. | Program Pengembangan Kawasan Perbatasan | 10 Pos Lintas Batas Negara (PLBN), Jalan Perbatasan Provinsi Kalimantan Timur, Jalan Paralel Perbatasan Provinsi Kalimantan Utara dan Jalan Akses Perbatasan Kalimantan Utara. |
| 4. | Program Pengembangan Jalan Akses *Exit Toll* | 58 lokasi *Exit Toll* pada 10 Provinsi. |
| 5. | Program Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional | Fokus lokasi di DPSP Danau Toba, DPSP Borobudur, DPSP Mandalika, DPSP Labuan Bajo, dan DPSP Likupang. |
| 6. | Dihapus | Dihapus |
| 7. | Program Pembangunan *Smelter* | Program Pembangunan *Smelter* terdiri dari:<br>a. Pembangunan 8 (delapan) Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Komoditas Nikel oleh:<br>1) PT Artabumi Sentra Industri di Morowali, Sulawesi Tengah;<br>2) PT Wanxiang Nickel Indonesia di Morowali, Sulawesi Tengah; |

| NO. | DAFTAR PROGRAM STRATEGIS NASIONAL | KETERANGAN PROGRAM STRATEGIS NASIONAL |
|---|---|---|
| | | 3) PT Artha Mining Industry di Bombana, Sulawesi Tenggara;<br>4) PT Ceria Nugraha Indotama di Kolaka, Sulawesi Tenggara;<br>5) PT Macika Mineral Industri di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara;<br>6) PT Virtue Dragon Nickel Industry di Konawe, Sulawesi Tenggara;<br>7) PT Aneka Tambang P3FH di Halmahera Timur, Maluku Utara; dan<br>8) PT Aneka Tambang Niterra Haltim di Halmahera Timur, Maluku Utara.<br>b. Pembangunan 3 (tiga) Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Komoditas Bauksit oleh:<br>1) PT Dinamika Sejahtera Mandiri di Sanggau, Kalimantan Barat;<br>2) PT Well Harvest Winning Alumina Refinery (ekspansi) di Ketapang, Kalimantan Barat; dan<br>3) PT Tianshan Alumina Indonesia di Lingga, Kepulauan Riau.<br>c. Pembangunan 2 (dua) Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Komoditas Tembaga oleh:<br>1) PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur; dan<br>2) PT Amman Mineral Industri di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat.<br>d. Pembangunan 1 (satu) Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Komoditas Pasir Besi dan Vanadium oleh PT Alchemist Metal Industry di Halmahera Utara, Maluku Utara.<br>e. Pembangunan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Komoditas Nikel Terintegrasi dengan Penambangan:<br>1) Smelter PT Bahodopi Nickel Smelting Indonesia dan Tambang PT Vale Indonesia Blok Bahodopi di Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah; dan |

| NO. | DAFTAR PROGRAM STRATEGIS NASIONAL | KETERANGAN PROGRAM STRATEGIS NASIONAL |
|---|---|---|
| | | 2) Smelter PT Kolaka Nikel Indonesia dan Tambang PT Vale Indonesia Blok Pomala di Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara.<br>f. Pembangunan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Komoditas Nikel Terintegrasi dengan Penambangan serta Kawasan Industri dalam rangka Pengembangan EV Battery Nasional PT Aneka Tambang Group, PT Industri Baterai Indonesia, serta mitranya di Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara.<br>g. Pembangunan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Alumina Terpadu:<br>1) Pembangunan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Bauksit oleh PT Borneo Alumina Indonesia di Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat Fase I; dan<br>2) Pembangunan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Bauksit oleh PT Indonesia Asahan Aluminium/Induk PT Borneo Alumina Indonesia serta mitranya di Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat Fase II yang terintegrasi dengan pembangunan smelter kedua oleh PT Indonesia Asahan Aluminium serta mitranya di Kuala Tanjung, Provinsi Sumatera Utara. |
| 8. | Program Peningkatan Penyediaan Pangan Nasional | Program Peningkatan Penyediaan Pangan Nasional dalam rangka Mendukung Ketahanan Pangan. |
| 9. | Program Pengembangan *Superhub* | Bali - Nusa Tenggara, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara dan Integrasi PT Pelindo I, PT Pelindo II, PT Pelindo III, dan PT Pelindo IV ke dalam PT Pelindo II. |

| NO. | DAFTAR PROGRAM STRATEGIS NASIONAL | KETERANGAN PROGRAM STRATEGIS NASIONAL |
|---|---|---|
| 10. | Program Percepatan Pengembangan Wilayah yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan dan Peraturan mengenai Ibu Kota Negara | Program terdiri dari:<br>a. Percepatan Pembangunan Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Negara dan Infrastruktur Pendukung Ibu Kota Negara yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara beserta perubahannya;<br>b. Percepatan Pengembangan Wilayah yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal - Pemalang;<br>c. Percepatan Pengembangan Wilayah yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan;<br>d. Percepatan Pengembangan Wilayah yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun;<br>e. Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan; dan<br>f. Percepatan Pengembangan Wilayah Lainnya yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. |
| 11. | Program Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus | Kawasan Ekonomi Khusus yang ditetapkan oleh Presiden. |
| 12. | Program Revitalisasi Industri Gula Nasional dan Hilirisasi Industri Kelapa Sawit | Integrasi Grup PT Perkebunan Nusantara melalui pembentukan SugarCo, PalmCo, dan SupportingCo. |
| 13. | Program Pengembangan Kawasan *Eco-City* | Pengembangan Kawasan Rempang *Eco-City* di Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan *masterplan*. |

| NO. | DAFTAR PROGRAM STRATEGIS NASIONAL | KETERANGAN PROGRAM STRATEGIS NASIONAL |
|---|---|---|
| 14. | Program Pertumbuhan Industri Pariwisata dan Penerbangan | Peningkatan Konektivitas Udara dalam rangka Pertumbuhan Industri Pariwisata dan Penerbangan. |
| 15. | Program Pengoperasian dan Modernisasi Jalan Tol | Penerapan *Multi-Lane Free Flow* (MLFF) untuk Pengoperasian dan Modernisasi Jalan Tol. |
| 16. | Program Pengendalian Banjir, Penanganan Kemacetan, dan Peningkatan Kelayakhunian di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta | Program Pengendalian Banjir, Penanganan Kemacetan, dan Peningkatan Kelayakhunian di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terdiri dari:<br>a. Pembangunan Simpang Tidak Sebidang;<br>b. Pembangunan Infrastruktur Pengendalian Banjir;<br>c. Pengembangan Infrastruktur Transportasi; dan<br>d. Pengembangan Fasilitas Pengolahan Sampah Terpadu. |
| 17. | Program Makan Bergizi Gratis | Nasional. |
| 18. | Program Sekolah Rakyat | Nasional. |
| 19. | Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih | Nasional. |
| 20. | Program Digitalisasi Pendidikan | Nasional. |
| 21. | Program Pengentasan Kemiskinan | Nasional. |
| 22. | Program Pengelolaan Sampah Terpadu | Daftar proyek berpedoman pada Peraturan Presiden. |
| 23. | Program Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional Merauke, Mappi, Asmat, dan Boven Digoel<br>(termasuk antara lain pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) berupa Cetak Sawah, Pengembangan Sawit, dan Pengembangan Peternakan, serta sarana pendukung lainnya) | Provinsi Papua Selatan. |
| 24. | Program Revitalisasi Tambak Pantura di Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Indramayu | Provinsi Jawa Barat. |

| NO. | DAFTAR PROGRAM STRATEGIS NASIONAL | KETERANGAN PROGRAM STRATEGIS NASIONAL |
|---|---|---|
| 25. | Program Pengembangan Budi Daya Udang Terintegrasi (*Integrated Shrimp Farming*) di Kabupaten Sumba Timur | Provinsi Nusa Tenggara Timur. |

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO